

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi adalah suatu proses dimana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Sedangkan globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa.

Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik (<http://madpocl.wordpress.com/2010/03/20/globalisasi-dalam-bidang-ekonomi/>).

Lahirnya globalisasi pasar bebas (*free trade*) misalnya, yang merupakan penegasan dari sistem kapitalisme neoliberal, tidak lain adalah strategi para kaum borjuis yang diwakili oleh negara-negara maju untuk mempertahankan kepentingannya. Dalam sistem itu, regulasi yang dipakai adalah mekanisme

pasar. Sehingga tidak ada pihak lain, termasuk negara yang bisa melakukan distorsi atau intervensi. Seluruh sistem yang dibangun dan pola kerja yang diciptakan tidak lain adalah manifestasi dari kepentingan ekonomi kaum borjuis dari berbagai negara maju. Maka tidak heran kalau kebijakan pasar sering tidak sejalan dengan spirit keadilan dan kepentingan masyarakat bawah (<http://bayigalihc.wordpress.com/2010/10/20/karl-marx-dan-sosialisme/>).

Seperti yang dialami oleh para pengusaha bengkel umum di sebagian besar wilayah di Indonesia yang dimana keberadaan mereka sering kali tidak tertata dengan rapih dan menyimpang dari peraturan yang ada dan dianggap merusak estetika kota.

Tumbuhnya bengkel umum diberbagai kota di Indonesia merupakan dampak dari meningkatnya penjualan kendaraan roda empat maupun roda dua di negeri ini. Hal ini didorong oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga banyak memunculkan kelas menengah baru yang memiliki kemampuan untuk membeli kendaraan roda empat ataupun roda dua. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Indonesia memunculkan peluang usaha baru, yaitu usaha bengkel yang merupakan usaha jasa yang melayani perbaikan kendaraan yang rusak serta memberikan perawatan terhadap kendaraan.

Salah satu wilayah di Indonesia yang mulai banjir kendaraan bermotor adalah Kabupaten Cilacap, sebuah kabupaten di wilayah Jawa Tengah ini mulai dibanjiri masuknya kendaraan bermotor oleh penduduknya,

sehingga seiring dengan meningkatnya kendaraan bermotor di kabupaten tersebut membuat mulai munculnya bengkel-bengkel umum di sekitar wilayah Kabupaten Cilacap.

Pada tahun 2012 jumlah kendaraan bermotor di kabupaten Cilacap sebanyak 330.153 unit, yang terdiri dari kendaraan jenis sedan, jeep, dan sejenisnya sebanyak 16.670 unit, sementara itu jumlah bus, minibus, dan sejenisnya sebanyak 467 unit, jumlah truk, pick up, tangki, troton sebanyak 9.222 unit, sedangkan jumlah kendaraan alat-alat berat sebanyak 1 unit, dan yang terbanyak adalah jumlah sepeda motor / scooter yang tercatat sejumlah 303.793 unit atau 92,02 persen dari seluruh kendaraan bermotor yang ada. Secara keseluruhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap naik sekitar 9,17 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 302.429 unit menjadi 330.153 unit (<http://Cilacapkab.bps.go.id/dokumen/digilib/2013/ip2013/files/assets/basic-html/page141.html>).

Pada tahun 2013 jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap meningkat menjadi 510.300 unit kendaraan. Hal ini disebabkan Kabupaten Cilacap merupakan wilayah kabupaten yang luas dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, sehingga jumlah kendaraan bermotor terus meningkat. Mengenai kepadatan penduduk di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 1 yang dipaparkan berikut ini :

Tabel 1.

Rincian Luas Wilayah, Jumlah, dan Kepadatan Penduduk serta Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Kecamatan di Wilayah UP3AD Kabupaten Cilacap sampai dengan bulan Mei 2013

| No | Kecamatan | Luas Wilayah (Km ²) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Kepadatan (Jiwa/Km ²) | Jumlah KBM*) | | Total KBM |
|----|-----------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | Roda 2 dan Roda 3 | Roda 4 atau lebih | |
| 1 | Cilacap Selatan | 9,11 | 78.464 | 8.613 | 42.015 | 6.286 | 48.301 |
| 2 | Cilacap Tengah | 22,15 | 83.985 | 3.792 | 47.826 | 7.854 | 55.680 |
| 3 | Cilacap Utara | 18,84 | 68.661 | 3.644 | 33.922 | 4.549 | 38.471 |
| 4 | Jeruk Legi | 96,80 | 62.879 | 650 | 17.328 | 1.337 | 18.665 |
| 5 | Kawunganten | 117,43 | 80.280 | 684 | 22.876 | 1.101 | 23.977 |
| 6 | Adipala | 61,19 | 79.717 | 1.303 | 24.000 | 1.770 | 25.770 |
| 7 | Maos | 28,05 | 48.079 | 1.714 | 13.814 | 1.176 | 14.990 |
| 8 | Sampang | 27,30 | 37.269 | 1.365 | 12.427 | 1.074 | 13.501 |
| 9 | Kesugihan | 82,31 | 93.039 | 1.130 | 34.629 | 2.432 | 37.061 |
| 10 | Binangun | 51,42 | 65.872 | 1.281 | 19.663 | 1.038 | 20.701 |
| 11 | Kroya | 58,83 | 103.004 | 1.751 | 27.689 | 2.450 | 30.139 |
| 12 | Nusawungu | 61,26 | 77.090 | 1.258 | 17.139 | 914 | 18.053 |
| 13 | Bantarsari | 95,54 | 68.940 | 722 | 6.066 | 262 | 6.328 |
| 14 | Kampung Laut | 146,14 | 16.840 | 115 | 280 | 31 | 311 |
| 15 | Majenang | 138,56 | 126.175 | 911 | 29.817 | 1.948 | 31.765 |
| 16 | Dayeuhluhur | 185,06 | 48.573 | 262 | 9.682 | 382 | 10.064 |
| 17 | Cimanggu | 167,44 | 97.883 | 585 | 16.261 | 834 | 17.095 |
| 18 | Wanareja | 189,73 | 95.630 | 504 | 20.709 | 891 | 21.600 |
| 19 | Sidareja | 54,95 | 57.123 | 1.040 | 12.346 | 713 | 13.059 |
| 20 | Karang Pucung | 115,00 | 73.018 | 635 | 12.620 | 541 | 13.161 |
| 21 | Gandrungmangu | 143,19 | 102.373 | 715 | 15.056 | 621 | 15.677 |
| 22 | Kedung Reja | 71,43 | 80.182 | 1.123 | 15.780 | 655 | 16.435 |
| 23 | Cipari | 121,47 | 61.657 | 508 | 9.525 | 401 | 9.926 |
| 24 | Patimuan | 75,30 | 45.535 | 605 | 9295 | 275 | 9.570 |
| | Jumlah | 2.138,50 | 1.752.268 | 819 | 470.765 | 39.535 | 510.300 |

Sumber : UP3AD Kabupaten Cilacap

Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor tahun 2013, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap meningkat cukup drastis dari tahun sebelumnya yaitu 64,5%, dari semula 330.153 unit menjadi 510.300 unit. Dengan meningkatnya kendaraan bermotor yang memberikan efek terhadap peningkatan pertumbuhan bengkel di berbagai kota di Indonesia, ternyata menimbulkan masalah baru, mulai dari perizinan yang tidak jelas

sehingga banyak juga bengkel-bengkel umum yang keberadaannya bersifat ilegal, selain itu juga keberadaan bengkel umum tidak tertata rapih, banyak keberadaannya khususnya yang berada ditengah-tengah pemukiman masyarakat membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu karena suara bising kendaraan yang lalu-lalang. Padahal sebenarnya masing-masing pemerintah kota ataupun daerah telah membuat aturan mengenai perizinan dan penataan bengkel umum, namun penerapan di lapangan masih jauh dari kata maksimal.

Dalam hal penataan bengkel umum, pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun 2012 telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap. Selain itu juga telah diterbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap. Untuk itu pada penelitian ini akan dibahas mengenai peran pemerintah Kabupaten Cilacap dalam melakukan penertiban terhadap keberadaan bengkel umum.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat diteliti, yaitu sebagai berikut;

1. Pertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap semakin pesat dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.
2. Semakin banyaknya bengkel umum yang tersebar di Kabupaten Cilacap.
3. Banyak bengkel umum di Kabupaten Cilacap yang tidak sesuai izin yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.
4. Minimnya kepedulian pengusaha bengkel umum dalam mengurus izin menjadi salah satu pemicu tingginya pertumbuhan bengkel umum yang tidak tertata rapi di Kabupaten Cilacap.

C. Batasan Masalah

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi masalah yang telah disebutkan pada identifikasi masalah dengan maksud agar penelitian menjadi lebih fokus dan terarah pada permasalahan pokok yang akan diteliti, seperti;

1. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menata keberadaan bengkel umum di wilayahnya.
2. Hambatan-hambatan apakah yang ditemmui dalam menata keberadaan bengkel umum di Kabupaten Cilacap.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam menata bengkel umum di wilayahnya?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam menata bengkel umum?

3. Apakah hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan menata bengkel umum?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui;

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Cilacap dalam penataan bengkel umum di wilayahnya.
2. Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menata bengkel umum.
3. Mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan penataan bengkel umum.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khasanah studi tentang implementasi peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang keberadaan bengkel umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemikiran dan khasanah keilmuan dibidang kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menelaah dan memahami secara kritis tentang partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan public.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap

Memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan selanjutnya terkait penataan bengkel umum di wilayah Kabupaten Cilacap.

c. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap

Memberikan kontribusi bagi seluruh jajaran dalam Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika guna meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait penataan bengkel umum.

G. Batasan Istilah

Untuk menghindari munculnya multi interpretasi atas judul penelitian yang ada, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan pembatasan pada beberapa istilah berikut;

1. Implementasi

Konsep implementasi memiliki pengertian sebagai suatu tindakan ataupun pelaksanaan yang berupa aktivitas dari sebuah rencana atau kebijakan yang telah dibuat secara matang dan terperinci. Pelaku implementasi biasanya adalah seseorang, lembaga ataupun kelompok

masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap suatu rencana atau kebijakan.

Jadi yang dimaksud sebagai bentuk implementasi dalam penelitian ini adalah sebuah tindakan atau pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan memiliki pengertian rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan cara bertindak. Kebijakan pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah konsep yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penertiban bengkel umum di Kabupaten Cilacap.

Jadi yang dimaksud bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap.

3. Penertiban Bengkel Umum

Penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertibkan. Bengkel umum dapat diartikan sebagai sebuah tempat yang dijalankan oleh satu orang individu atau lebih yang bekerja untuk membetulkan dan atau merawat kendaraan yang berada dalam kondisi yang rusak atau kurang baik.

Jadi yang dimaksud dengan penertiban bengkel umum dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan menertibkan sebuah tempat yang dijalankan oleh satu orang individu atau lebih yang bekerja untuk membetulkan dan atau merawat kendaraan yang berada dalam kondisi yang rusak atau kurang baik.

4. Bengkel Umum

Bengkel umum dapat diartikan sebagai sebuah tempat yang dijalankan oleh satu orang individu atau lebih yang bekerja untuk membetulkan dan atau merawat kendaraan yang berada dalam kondisi yang rusak atau kurang baik.

Jadi yang dimaksud bengkel umum dalam penelitian ini adalah sebuah tempat yang dijalankan oleh satu orang individu atau lebih yang bekerja untuk membetulkan dan atau merawat kendaraan yang berada dalam kondisi yang rusak atau kurang baik yang berada diseluruh wilayah Kabupaten Cilacap.